



URGENSI PRODUK MAMIN UMKM BERSERTIFIKAT DAN BERLABEL HALAL DI KOTA MATARAM

Armiani^{1*}, Dwi Arini Nursansiw², Surahman Hidayat³, Syaiful Amri⁴, Topan Siswanto⁵,
Sopian Saori⁶

^{1,3,4,5,6} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram

² STISIP Mbojo Bima

*Corresponding author

E-mail: armiani2016unair@gmail.com

ABSTRAK

Produk bersertifikat dan berlabel halal memiliki market yang sangat menjanjikan dikarenakan Indonesia merupakan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Sehingga para pelaku UMKM wajib memiliki dan memproduksi produk yang bersertifikat dan berlabel halal. Program PkM menawarkan dan memberikan solusi untuk para pelaku UMKM agar dapat lebih cepat memiliki sertifikat dan berlabel halal pada produknya. PkM ini dengan menggunakan pendekatan community development agar program yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk membantu dan memberikan solusi yang dihadapi oleh para stakeholders. Program PkM dilakukan pada bulan mei-juni 2022. Hasil kegiatan program PkM menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran untuk memiliki sertifikat halal pada produk yang diproduksinya, serta dapat menggunakan label halal pada produknya guna untuk perkembangan dan keberlanjutan bisnisnya.

Kata Kunci: *Sertifikat Halal; Label Halal; Produk Mamin; UMKM*

ABSTRAC

Halal certified and labeled products have a very promising market because Indonesia is the largest Muslim population in the world. So that MSMe actors are required to have and produce products that are certified and labeled as halal. The PkM program offers and provides for MSMe actors so that they can more quickly have certificates and labels for halal products on products. This PkM uses a community development approach so that the program is carried out systematically, planned and directed to assist and provide solutions faced by stakeholders. The PkM program is carried out in May-June 2022. The results of the PkM program activities show that the level of understanding and awareness is to have a halal certificate for the products it produces, and can use the halal label in its business development and development.

Keywords: *Keywords : Halal Certificate; Halal Labels; Food and Beverage Products; MSMe*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan mayoritas penduduk muslim yang terbesar di dunia yaitu berjumlah 86,88%. Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim yaitu sebesar 96,83% <https://databoks.katadata.co.id>. Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi warga negaranya dengan diterbitnya Undang-undang dan peraturan pemerintah. Undang-undang No. 33 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah (PP) No. 31



Tahun 2019 tentang Jaminan produk halal, dan Peraturan Meteri Agama (PMA) No. 26 Tahun 2019 tentang penyelenggara jaminan produk halal, serta Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) No. 26 Tahun 2017. Kehalalan suatu produk dapat diketahui dari proses produksi sampai penjualan pada konsumen (Faridah, 2019), namun sekilas dapat juga dilihat pada kemasan produknya.

Saat ini market untuk produk makanan dan minuman (mamin) bersertifikat dan berlabel halal sangat memberikan peluang yang menjanjikan untuk keberlanjutan bisnis, dikarenakan pertumbuhan muslim mampu meningkatkan daya beli konsumen (Boni & Forleo, 2019), serta produk UMKM yang bersertifikat dan berlabel halal mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, hal tersebut memotivasi para pelaku UMKM meningkatkan kesadarannya untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan pelayanan pada konsumen muslim (Basir, 2018), artinya para pelaku UMKM harus memiliki produk yang bersertifikat dan berlabel halal pada produk yang diproduksinya tersebut (Ab Talib et al., 2017).

Provinsi NTB dengan ikon wisata halal yang berhasil mendapatkan penghargaan sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia pada Tahun 2015 dan 2016, serta penghargaan destinasi bulan madu terbaik dunia pada Tahun 2016 <https://radarlombok.co.id>. Pemerintah NTB kian fokus dalam memperkuat dan mempersiapkan konsep wisata halal World Halal Tourism Summit pada bulan November 2022 <https://www.ntbprov.go.id>, hal tersebut tidak terlepas dukungan UMKM produk makanan dan minuman (mamin) yang bersertifikat dan berlabel halal. Keterkaitan wisata halal dengan produk halal merupakan hal yang sangat berpengaruh untuk keberhasilan program daerah tersebut, dikarenakan para wisatawan muslim akan merasa nyaman, senang dan tenang jika difasilitasi semua kebutuhannya berlabel halal, (contoh; produk makanan minuman harus bersertifikat dan berlabel halal, produk fashion halal (busana halal).

Pemerintah Kota mataram sangat mendukung kepemilikan sertifikat halal untuk produk UMKM, sehingga aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan pada para pelaku UMKM untuk segera mengurus sertifikasi halal, namun dari data yang ada baru 20-25% produk UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal

<https://www.antaraneews.com/>. Hal tersebut termotivasi bagi Tim untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat (program PkM) guna membantu mensukseskan program pemerintah untuk kepengurusan sertifikasi halal secara gratis. Salah seorang dari Tim kami memiliki nomor sertifikat Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) langsung dari BPJPH-MUI, hal tersebut mempermudah bagi tim kami untuk dapat langsung membantu dan memproses produk makanan dan minuman (mamin) dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha (self declare). Di dalam sertifikasi halal self declare, pendamping PPH akan memerankan dirinya sebagai pendamping yang bertugas untuk memastikan kehalalan produk UMK melalui pendampingan PPH. Aktivitas tersebut dilaksanakan melalui verifikasi dan validasi <https://www.kemenag.go.id>. Alur proses pengurusan sertifikasi halal, dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Proses Sertifikasi Halal

B. METODE

Metode pendekatan yang dilakukan pada program Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini, yaitu *community development*. *Community Development* merupakan program kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan kegiatan

sebelumnya (Resnawaty & Darwis, 2018). Sehingga para pelaku UMKM dilokasi tersebut dapat lebih mandiri, lebih percaya diri, lebih berkreaitif dan lebih berproduktif dengan menghasilkan produk-produk UMKM terbaiknya, dengan tujuan dapat dipasarkan secara global, hal tersebut tidak terlepas dari legalitas usahanya yang memiliki sertifikat halal dan berlabel halal pada produknya. Adapun tahapan dan alur yang dilakukan pada PkM ini, perlu dirancang dengan baik, agar tujuan yang diharapkan tercapai. Tahapan dan alurnya adalah sebagai berikut;

1. Identifikasi *stakeholder* (apa masalah yang dihadapi masyarakat)
2. Pengumpulan data dan menganalisa kebutuhan *stakeholders*
3. Menentukan prioritas dan solusi masalah yang dihadapi
4. Persiapan dan rencana solusi yang ditawarkan
5. Pelaksanaan kegiatan PkM (implementasi, pelatihan dan pendampingan)
6. Review dan evaluasi kegiatan dan hasil
7. Menentukan dan menganalisa kebutuhan serta sasaran baru untuk kegiatan berikutnya
8. Selesai



Gambar 2. Alur Program Kegiatan PkM

Gambar 2 merupakan alur program kegiatan PkM, dengan konsep *community development*. Sehingga tim kami mulai program kegiatan PkM ini dengan tahapan pembentukan tim yang tujuannya agar terarah *jobdesk* masing-masing individu yang tergabung pada tim ini. Hal selanjutnya merencanakan program apa yang tepat untuk para pelaku UMKM tersebut, dengan mengidentifikasi apa kebutuhan dan kendala yang dirasakan dan yang sangat dibutuhkan dalam jangka waktu pendek, sehingga tim dapat menentukan program prioritas yang tepat dalam melakukan dan memberi solusi pada

para pelaku UMKM. Setelah menentukan program dan membagi *jobdesk*, masing-masing individu mulai menyiapkan bahan sesuai *jobdesk* yang telah disepakati tim dan menjadwalkan untuk dilakukan pelatihan dan pendampingan pada para pelaku UMKM yang menginginkan produknya memiliki sertifikat dan berlabel halal. Dalam setiap pelatihan dan pendampingan tim akan melakukan evaluasi dan review untuk mengetahui program dapat berjalan sesuai harapan atau perlu ada strategi yang lain untuk memudahkan program PkM dapat tercapai dengan sukses.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan di kecamatan Selaparang Kota Mataram, hal tersebut dikarenakan di kecamatan selaparang terdapat 37 hotel <https://www.traveloka.com/id-id/hotel/indonesia/area/selaparang-104817>. Sehingga produk UMKM akan sangat berpengaruh pada kenyamanan tamu hotel ataupun para wisatawan khususnya wisatawan muslim serta wisatawan yang menginginkan produk UMKM untuk menjadi oleh-olehnya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa produk UMKM sangat urgensi pada legalitas yang bersertifikat dan berlabel halal pada produknya, terutama produk makanan dan minuman (mamin). Program PkM ini dilakukan beberapa kali dikarenakan banyaknya warga kecamatan selaparang yang menjadi pelaku UMKM (sehingga kegiatannya menjadi 2 kali). Kegiatan dilakukan untuk memberikan edukasi pentingnya produk UMKM bersertifikat dan berlabel halal, serta memberikan pemahaman strategi pemasaran agar produk UMKM dapat bersaing dengan produk lainnya.



**URGENSI PRODUK MAMIN UMKM BERSERTIFIKAT
& BERLABEL HALAL DI KECAMATAN SELAPARANG
KOTA MATARAM NTB**

Dr. Armiani, S.E., M.Ak
Dwi Arini Nursansiwij, S.E., M.Ak

Surahman Hidayat, S.T., M.E
Syaiful Amri, S.Pd., M.Pd
Topan Siswanto, SE., MM

4 Juni 2021



Gambar 3. Bahan Presentasi dalam Memberikan Pelatihan di kecamatan Selaparang.

Materi presentasi tentang urgensi produk mamin UMKM bersertifikat dan berlabel halal disampaikan oleh Ibu Dr. Armiani, SE., M.Ak dan Ibu Dwi Arini Nursansiwi, SE., M.Ak, Surahman Hidayat, ST., M.E, Syaiful Amri, S.Pd.,M.Pd, dan Topan Siswanto, SE.,MM secara bersama-sama dan dilakukan sebanyak 2 kali pada pelatihan di Kecamatan Selaparang. Paparan materi yang disampaikan tim pada pelatihan memberikan edukasi tentang dasar hukum muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, memberikan edukasi bagaimana strategi bisnis dan strategi pemasaran yang tepat agar produk dapat bersaing dengan produk lainnya. Serta melatih bagaimana alur dan cara pembuatan sertifikat halal untuk produk mamin yang diproduksi dan kapan produk berkabel halal.

Program kegiatan PKM berjalan dengan baik dan lancar, hal tersebut didukung penuh oleh pemerintah kecamatan dan berkoordinasi dengan seluruh kelurahannya. Jadwal kegiatan dibuat atas kesepakatan pihak pemerintah kecamatan dan tim PkM, ditinjau dari kegiatan/ jadwal pengajaran pada masing-masing kampus dan kegiatan lainnya.

Program kegiatan PKM ini dilakukan selama bulan Mei - Juni 2022, dimana pihak pemerintah kecamatan dan Kelurahan sangat antusias untuk mendukung terlaksananya kegiatan ini, serta pelaku UMKM sangat termotivasi untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggaran tersebut. Berdasarkan dari kegiatan program PkM yang sudah dilakukan, hasil evaluasi dapat diperoleh sebagai berikut;

Tabel 1. Kondisi UMKM sebelum Mengikuti Pelatihan Program PkM

No	Item/Komponen	Kondisi	Keterangan
1	Pemahaman Legalitas Halal	Kurang	NTB mayoritas muslim, sehingga yakin bahwa semua produk halal.
2	Dasar Hukum Muslim wajib mengkonsumsi makanan Halal	Kurang	Belum terpikirkan menggali terkait dasar hukum makanan harus halal
3	Strategi Bisnis dan strategi pemasaran produk bersertifikat dan berlabel halal	Kurang	Masih penjualan secara tradisional dan pemasaran hanya dari mulut ke mulut.

Tabel 2. Kondisi UMKM setelah Mengikuti Pelatihan Program PkM

No	Item/Komponen	Kondisi	Keterangan
1	Pemahaman Legalitas Halal	Cukup Baik	Termotivasi untuk membuat sertifikat Halal Agar produknya dapat bersaing untuk jangkauan penjualannya
2	Dasar Hukum Muslim wajib mengkonsumsi makanan Halal	Cukup Baik	Sadar dan bersyukur bahwa Islam mengatur kehidupan manusia di Dunia.
3	Strategi Bisnis dan strategi pemasaran produk bersertifikat dan berlabel halal	Cukup Baik	Pendaftaran NIB dapat dilakukan secara mandiri walaupun tetap didampingi, serta sudah Mulai menggunakan sosmed untuk transaksi bisnisnya.

Berdasarkan tabel 1 dan 2 diatas para pelaku UMKM sadar dan bersyukur bahwa agama Islam mengatur kehidupan umat manusia di Dunia ini, sehingga termotivasi untuk membuat sertifikat halal dan produknya berlabel halal guna memberikan kenyamanan bagi konsumennya. Untuk strategi bisnisnya para pelaku UMKM dapat lebih faham dalam menentukan kapan strategi bisnis tersebut tepat dilakukan dan termotivasi untuk memasarkan produknya secara nasional. Hal tersebut sejalan dengan PKM yang dilakukan oleh (Yuniti et al., 2021).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan program PkM yang sudah terlaksana ini, menjadi solusi



untuk para pelaku UMKM dalam pemahamannya terkait produk makanan dan minuman UMKM yang bersertifikat dan berlabel halal, baik dari segi hukum agama, legalitas, maupun untuk perkembangan dan keberlanjutan bisnisnya tersebut.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Program PkM mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kecamatan Selaparang dan jajarannya dan kepada LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram, serta kepada LP3M STISIP Mbojo Bima. Tidak lupa ucapan terima kasih juga pada pelaku UMKM dan semua yang sudah membantu pelaksanaan kegiatan ini, sehingga Program PkM dapat terlaksana dengan baik dan sukses.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Talib, M. S., Ai Chin, T., & Fischer, J. (2017). Linking Halal food certification and business performance. *British Food Journal*, 119(7), 1606–1618. <https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2017-0019>
- Basir, N. (2018). Motivational factors for halal certification adoption among small and micro enterprises in Malaysia. *International Journal of Supply Chain Management*, 7(4), 391–396. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85052571328&origin=inward>
- Boni, A. De, & Forleo, M. B. (2019). Italian halal food market development: drivers and obstacles from experts' opinions. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/jima-05-2018-0087>
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*. <https://e-journal.unair.ac.id/JHPR/article/view/17007/9168>
- Resnawaty, R., & Darwis, R. S. (2018). Community Driven Development Dalam Implementasi Corporate Social Responsibility oleh PT. Pertamina Subang. *Share : Social Work Journal*, 8(1), 64. <https://doi.org/10.24198/share.v8i1.16426>
- Yuniti, I. G. A. D., Sukanteri, N. P., Verawati, Y., & Suryana, I. M. (2021). Pengembangan Umkm Melalui Kerjasama Perusda, Swasta Dan Legalitas Usaha. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 4, 487–494. <https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v4i0.1187>